

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2015**

(Skripsi)

Oleh

Nissa Nurul Fathia



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

POLITICAL PARTICIPATION OF PERSON WITH DISABILITIES IN BANDAR LAMPUNG MAYORAL ELECTION YEAR OF 2015

By

NISSA NURUL FATHIA

Political participation defines the embodiment of the legitimate political power by the people and carried out through an involvement in political elections. The mayoral election of Bandar Lampung required a full participation from its residents, including people with disabilities. It is known that before today, the government prone to abandon people with disabilities to participate in political elections. In the other side, those disabled persons were less active in political participation held in the city of Bandar Lampung, like joining group of interest, joining the campaign, and casting for vote in elections.

The purpose of this research is to find out the political participation of persons with disabilities in the mayoral election of Bandar Lampung – Year of 2015. The method used in this research is descriptive qualitative by using the theory of Abramson conventional political participation and Haerckwik. The overall data in this study were obtained through in-depth interviews and documentation.

The results showed that the political participation of persons with disabilities in the mayoral election of Bandar Lampung in 2015 occurred in casting a vote. According to those disabled persons, political participation of voting did not require a lot of efforts as well as easy to implement. Besides, it was the lack of intensity of political participation of persons with disabilities to join in a campaign team supporters and participated in the campaign activity by the mayor candidates of Bandar Lampung. The persons with disabilities prefer to use their voting rights at the polling stations during the mayoral elections of Bandar Lampung. After all, the intensity of political participation of persons with disabilities on mayoral election of Bandar Lampung in 2015 was classified as observers category.

Keywords: political participation, person with disabilities

ABSTRAK

PARTIIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

Oleh

NISSA NURUL FATHIA

Partisipasi politik adalah perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan dalam pemilu. Pada pelaksanaan pilkada Kota Bandar Lampung mutlak dibutuhkan partisipasi politik dari seluruh masyarakat termasuk juga dari para penyandang disabilitas. Sebelumnya dalam pemilihan umum para penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas kurang diperhatikan keberadaannya. Selain itu juga para penyandang disabilitas pun kurang aktif dalam berpartisipasi disetiap kegiatan pemilu yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung mulai dari bergabung dalam kelompok kepentingan, mengikuti kegiatan kampanye sampai dengan pemberian suara.

Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori bentuk partisipasi politik konvensional Abramsom dan Haerckwik. Keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015 adalah hanya berpartisipasi politik dalam kegiatan pemberian suara. Menurut para penyandang disabilitas kegiatan partisipasi politik dengan hanya memberikan suara pada saat pilkada tidak menuntut banyak upaya serta mudah untuk dilaksanakan. Selain itu minimnya intensitas dari partisipasi politik penyandang disabilitas dalam bergabung ke tim sukses dan mengikuti kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh para calon kepala daerah Kota Bandar Lampung. Para penyandang disabilitas

Nissa Nurul Fathia

lebih memilih hanya memberikan hak suaranya di TPS pada saat Pilkada Kota Bandar Lampung. Kategori intensitas partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015 adalah berada pada tingkat kategori sebagai pengamat.

Kata Kunci: partisipasi politik, penyandang disabilitas.

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2015**

Oleh

Nissa Nurul Fathia

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2015**

Nama Mahasiswa : *Nissa Nurul Fathia*

No. Pokok Mahasiswa : **1216021086**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

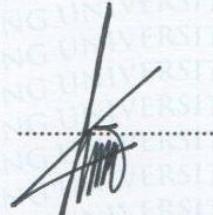
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

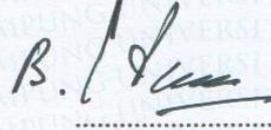
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**



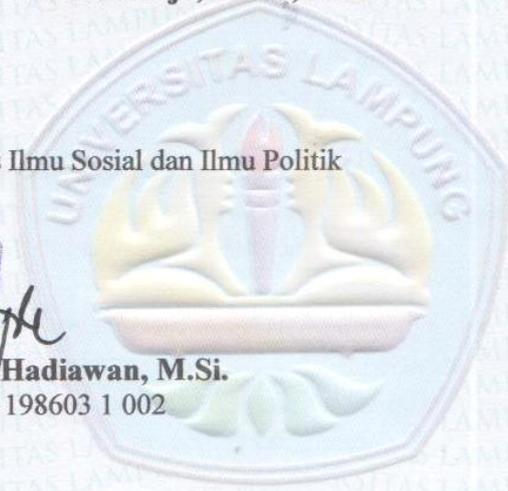
Penguji : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian : **20 Juni 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juni 2016
Yang Membuat Pernyataan,



Nissa Nurul Fathia
NPM. 1216021086

RIWAYAT HIDUP



Nissa Nurul Fathia, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1995, merupakan anak dari pasangan Bapak Asril Agus S.T. (Alm) dan Ibu Ida Rahayuningsih. S.E. Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara.

Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) YWKA II Jakarta Selatan pada tahun 1999-2000 kemudian dilanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) AL-Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2000-2006. Selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Pendidikan Abdi Negara Bekasi pada tahun 2006-2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2009-2012 Selanjutnya pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis meyakini pengembangan diri manusia harus dicari dan dialami sehingga menjadi sebuah pengalaman dalam hidup dimasa depan. Penulis banyak mendapatkan hal-hal baru serta bermanfaat saat menjalani proses sebagai mahasiswa yang aktif di beberapa lembaga organisasi kemahasiswaan kampus.

MOTTO

**“Maka sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan.
Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan”**

(QS Al-Insyiraah : 5-6)

**“Hidup seperti mengayuh sepeda, kau tidak akan jatuh jika tak berhenti
mengayuh ”**

(Francis Bacon)

“HIDUP SELALU DIMULAI SAAT KITA MENGUCAP SYUKUR”

(YUSUF MANSYUR)

“Jangan Mengeluh Jadilah Tangguh”

(Nissa Nurul Fathia)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang luar biasa dalam

hidupku:

“Ibu dan Alm. Ayah tercinta”

Yang telah mendidik, membesarkan, selalu memberikan do'a terbaik dalam sujudnya, memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi yang tiada henti kepadaku hingga karya ini dapat terselesaikan.. Serta telah memberikan arti kehidupan melalui jerih payah, rintihan, dan petuah dalam proses hidup yang cukup panjang.

“kakakku”

Yang telah memberikan do'a serta semangat hingga karya ini dapat terselesaikan.

*Seluruh **Keluarga Besar**ku dan sahabat terbaik yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan selama proses pendidikan berlangsung dan akhirnya dapat menyelesaikan karya yang sederhana ini.*

Para Guruku

Dari Jenjang TK sampai perkuliahan, terimakasih atas bimbingan serta ilmu yang bermanfaat

ALMAMATERKU “UNIVERSITAS LAMPUNG”

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil`alaamiin...

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtuaku motivator terbesar dan teristimewa yang telah membesarkan mendidik dan memberikan curahan kasih sayang serta doa dan semangat yang tak pernah kurang dengan sepenuh hati. Untuk almarhum papah, terimakasih sudah menjadi sosok seorang ayah yang sangat luar biasa semasa hidupnya selalu mengajarkan serta mendidik kedua anaknya dengan sangat baik. Untuk mamah, sosok seorang ibu yang sangat luar biasa tangguh yang selalu mengajarkan banyak arti kehidupan untuk kedua anaknya

terimakasih banyak untuk semua kasih sayang, nasehat serta kepercayaan yang telah diberikan.

2. Terimakasih kepada Kakak Laki-Lakiku satu-satunya M.Ichsan Yuliansyah terimakasih untuk semua doa, dukungan dan motivasinya.
3. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku yang telah memberikan doa, dukungan dan telah banyak membantu baik secara moril maupun materil.
4. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan juga selaku dosen Pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas kesediaanya yang dengan sabar memberikan bimbingan, saran, kritik serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.Ip. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan arahan pada penulis dengan pembawaan yang santai dan bersahabat sehingga memudahkan penulis untuk mencerna arahan tersebut.
7. Bapak Syafarudin S.Sos, M.A. selaku Pembimbing Akademik yang selama proses perkuliahan telah banyak sekali memberikan motivasi, arahan serta bimbingan agar tetap kuat dan semangat untuk menggapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan.
8. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP. selaku Pembahas Dosen pada penelitian skripsi ini. Terima kasih untuk kesabaran dan kesediaan waktu yang telah bapak luangkan. Saya secara pribadi bersyukur mendapatkan pembahas dosen seperti bapak yang sangat baik dan sabar.

9. Seluruh jajaran Dosen, Staff, dan Karyawan FISIP Unila khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan terima kasih untuk segala ilmu yang bermanfaat dan wawasan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis yang pernah penulis rasakan selama menjadi mahasiswa, mohon maaf bila banyak sekali hal yang kurang berkenan selama ini.
10. Terimakasih kepada bapak Dedy Triyadi, Bapak Supron Ridisno, dan seluruh informan pada KPU Kota Bandar Lampung serta Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini.
11. Terimakasih untuk LPG 04 sahabat-sahabatku tersayang Arum Rahma Sari, Dita Adistia, Nisa Seftiara terimakasih untuk persahabatan kita yang dimulai dari awal masuk perkuliahan sampai saat ini dan seterusnya, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik dalam hidup, terimakasih atas warna-warni kehidupan yang telah diberikan selama ini, susah senang yang seringkali kita hadapi bersama, perjuangan yang juga kita rasakan bersama, kita akan tetap menjadi sahabat terbaik yaaa seterusnyaaaa ☺.
12. Terimakasih kepada Intan Kumala, Nevia Setiana, Pimadya Ayu, Winda Dwi Astuti, Juanda, Nugraha Wijaya, Nico Purwanto, Rizky Hendarji, Hezby Fauzan, Rosim Nyerupa, M. Ichsan dan Vico Bagja terimakasih untuk kebersamaannya selama ini, baik dalam berproses di bidang akademik, organisasi, ataupun hore-hore yang kita lakukan bersama-sama terimakasih.
13. Terima kasih kepada keluarga besar Ilmu Pemerintahan angkatan 2012: Suci Pebrina, Agustin Darma Putri, Adelita Riantini, Aulia Kartika, Angela Cathlya, M.TSaqib, Astari Puja, Fitria Zainubi, Bakti Saputra, Filza Arlisia,

Maldi Wijaya, Yessy Yolanda, Aidila Putri, Defi Yuniasari, Ika Meyta Sari dan untuk semua angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih untuk segala cerita dan proses yang pernah terukir selama di kampus.

14. Terima kasih kepada keluarga besar Ilmu Pemerintahan angkatan 2010 dan 2011 untuk segala ilmu pengetahuan dan pengalaman organisasi yang sudah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa yang tidak pernah penulis temui dibangku kuliah, terimakasih Bang Iin, Bang Robby, Bang Putra, Bang Okta, Bang Eky, Mba Siska, Mba Eta, Mba Yoan, Bang Radit, Bang Dimas, Bang Kepin, Bang Tano, Bang Wilanda, Bang Anbeja, Mba Restia, Bang Hazi terimakasih untuk segala ilmu yang telah diajarkan.
15. Untuk teman-teman dan adik-adik lintas Jurusan Nick, Ayu, Ocak, Eno, Maya, Risky, Sheila. Teman-teman dari TK, SD, SMP, dan SMA terimakasih kalian telah memberi warna.
16. Teman-Teman KKN Kecamatan Meraksaaji Kabupaten Tulang Bawang Nanda, Kak Yeni, Aji, Kak Fietra, Kak Dinan, Ira, dan terkhusus untuk teman 1 kelompok Desa Kecubung Raya (Kak Tri, Juju, Aning dan Kak ian) terimakasih untuk pengalaman yang tidak pernah terlupakan dan telah menjadi keluarga terbaik selama 40 hari, kita tetap jalin silaturahmi yang baik yaa.
17. Terima kasih kepada adinda-adinda angkatan 2013 dan 2014: Danang, Tyas, Taufiq, Kenn, Resti, Chili-Chili pink (Depoy, bella, Fira, Mike, Nyunyun), Adit, Icha, Melda, Mukhlisi, Abu, dll terimakasih untuk semua proses yang pernah dirasakan bersama-sama selama dikampus.

18. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung terwujudnya kelulusan ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan segala kerendahan hati semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi ilmu pengetahuan. Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Juni 2016
Penulis,

Nissa Nurul Fathia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
1. Secara Teoritis	11
2. Secara Praktis.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Partisipasi Poitik	12
1. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik	18
2. Intensitas Partisipasi Politik.....	20
B. Kesadaran Politik dan Kepercayaan Kepada Pemerintah	24
C. Penyandang Disabilitas	26
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	26
2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas	27
3. Aksesibilitas Terkait Partisipasi Penyandang Cacat dalam Pemilu	29
D. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	30
1. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah	30
2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah	31
E. Kerangka Pikir	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	35
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
D. Jenis Data	40
1. Data Primer	40
2. Data Sekunder.....	40

E.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
1.	Wawancara.....	41
2.	Dokumentasi	44
F.	Teknik Pengelolaan Data	44
G.	Informan.....	45
H.	Teknik Analisis Data.....	47
I.	Tekhnik Keabsahan Data	49
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		
A.	Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung.....	51
B.	Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung	54
C.	Komisi Pemilihan Umum	57
D.	Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016.....	59
E.	Yayasan Pusat Pemilihan Umum Aksesibilitas Penyandang Cacat (PPUA Penca)	61
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN		
A.	Karakteristik Informan.....	64
1.	Stakeholder Utama (Primer)	65
2.	Stakeholder Pendukung (Sekunder).....	66
B.	Hasil dan Pembahasan Penelitian	66
1.	Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	68
2.	Kegiatan Kampanye.....	78
3.	Pemberian Suara	88
VI. SIMPULAN DAN SARAN		
A.	Simpulan	106
B.	Saran	107
C.	Kelemahan Penelitian	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia Dalam Pemilu 2014	6
2. Banyaknya Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2014	8
3. Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung dalam Pilgub 2014	9
4. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik	19
5. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
6. Deskripsi Informan	46
7. Daftar Walikota Bandar Lampung dari Masa ke Masa	53
8. Jumlah Penyandang Disabilitas & Pengguna Hak Pilih Disabilitas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015	61
9. Stakeholder Utama Penelitian	65
10. Jumlah Penyandang Disabilitas & Pengguna Hak Pilih Disabilitas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Piramida Partisipasi Politik.....	22
2. Bagan Kerangka Pikir	34
3. Peta Wilayah Kota Bandar Lampung.....	56
4. Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Periode 2014 S/D 2019	59
5. Struktur Kepengurusan Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung Periode 2014-2019	63

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam tatanan negara demokrasi. Pada negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan rakyat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Partisipasi dari seluruh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arah politik suatu daerah. Semua masyarakat yang telah berumur 17 tahun keatas dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum (Pemilu).

Partisipasi politik juga dapat dikatakan sebagai perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pemilu. Sejalan dengan pemahaman seperti di atas terdapat korelasi antara partisipasi politik baik secara individu ataupun kelompok dengan pemilihan umum yang bertujuan memilih pemimpin. Oleh karena itu secara yuridis pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia. Oleh sebab itu maka partisipasi politik masyarakat dalam proses kegiatan pemilu menjadi sangat penting sebab legitimasi hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses kegiatan politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama tersebut merupakan media penyaluran kepentingan atau sekurang-kurangnya dapat diperhatikan. Selain itu masyarakat juga percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik. Sehubungan dengan pembahasan tentang partisipasi politik, pada tahun 2015 telah diselenggarakannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari pemilu serta merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung merupakan proses rekrutmen politik yang merupakan penyeleksian masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap tokoh-tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, dimana seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung memiliki hak serta kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon yang akan didukungnya. Pelaksanaan pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015 diselenggarakan berdasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana kepala daerah dipilih untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tahapan awal yang dilakukan oleh masing-masing calon kandidat adalah melakukan penggalangan dukungan dari berbagai pihak didalam masyarakat. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU para kandidat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan secara resmi mengikuti pemilihan umum. Selanjutnya pada waktu yang sudah ditentukan oleh KPU diberikan kesempatan kepada masing-masing calon untuk melakukan kegiatan kampanye.

Saat calon kepala daerah melakukan kampanye KPU selaku penyelenggara pilkada melakukan upaya penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) agar jumlah pemilih yang akan berpartisipasi diketahui dengan jelas. Selanjutnya pada tahap akhir KPU menentukan jadwal pemungutan suara sebagai sarana masyarakat untuk menentukan kepala daerah terpilih.

Pada pelaksanaan pilkada Kota Bandar Lampung baik saat berlangsungnya pemilihan maupun saat kegiatan kampanye mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat termasuk juga partisipasi dari para penyandang disabilitas yang juga mempunyai hak sama dengan masyarakat lainnya. Seperti yang diberitakan dalam surat kabar online tempo.com tanggal 24 November 2015 yang di akses pada tanggal 20 Januari 2016 Pukul 22. 00 WIB, untuk kegiatan kampanye partisipasi penyandang disabilitas masih sangat minim hal tersebut dapat dimaklumi mengingat bahwa secara fisik penyandang

disabilitas diartikan sebagai orang yang mempunyai keterbatasan mental, fisik, intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu lama.

Meskipun demikian sebenarnya bukan tidak mungkin para penyandang disabilitas berpartisipasi dalam kegiatan kampanye sepanjang ada keinginan yang kuat dan ditunjang akses serta fasilitas yang baik. Penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak jumlahnya sehingga tidak boleh diabaikan keberadaannya. Berdasarkan data yang didapat dari website <http://kementerian-kesejahteraan-sosial-Republik-Indonesia> yang diakses pada tanggal 02-November-2015 pukul 14. 00 WIB memaparkan bahwa dalam catatan Kementerian Kesejahteraan Sosial pada tahun 2014, jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 2. 126. 000 jiwa dengan klasifikasi jenis kecacatan berbeda-beda yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Saat menghadapi pemilu penyandang disabilitas akan berhadapan dengan hambatan dan kendala yang menyulitkan mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi: hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, dan hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain ketiga pokok hak penyandang disabilitas di atas terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu, saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya, penyandang disabilitas dengan

jenis kecacatan tuna netra, dan kecacatan fisik lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf *braille* untuk memudahkan mereka dalam memilih.

Hambatan dan kendala yang kerap terjadi pada penyandang disabilitas saat dilaksanakannya pemilu yaitu seringkali tidak diperhitungkannya hak suara dari penyandang disabilitas yang juga sering dianggap remeh oleh masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki. Selain itu kurangnya transparansi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyandang disabilitas serta jumlah dan posisi penyandang disabilitas banyak yang tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan oleh keengganan petugas pendata untuk menanyakan jenis disabilitas kelompok yang di data dan kecurangan petugas pendata untuk tidak mendaftarkan pemilih penyandang disabilitas.

Meskipun KPU telah membuat aturan-aturan yang diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilu tetapi pada kenyataannya hak berpolitik penyandang disabilitas masih dikesampingkan, masyarakat lainnya ataupun petugas di TPS terkadang masih menganggap remeh para penyandang disabilitas. Oleh karena itu kelompok-kelompok kepentingan yang memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas mulai marak bermunculan baik di tingkat nasional ataupun lokal.

Berdasarkan data yang dihimpun pada website <http://kpu-bandarlampungkota.go.id> dan majalahtempo.com yang diakses pada tanggal 18 Januari 2016 pukul 20. 15 WIB pada tingkat nasional telah berdiri organisasi penyandang disabilitas, organisasi ini berfokus pada penelitian, advokasi, pemantauan akses pemilu, dan membangun dialog regional tentang partisipasi politik penyandang disabilitas. Sedangkan pada tingkat lokal Kota Bandar Lampung juga telah berdiri kelompok kepentingan yang memiliki tujuan serupa yaitu PPUA PENCA (Pusat Pemilihan Umum Aksesibilitas Penyandang Cacat) yang dipimpin oleh ketua umum Supron Ridisno.

Pada sisi yang lain hal yang merupakan pengecualian dari hambatan dan kendala seperti di atas justru terjadi, tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum pada tahun 2014 lalu di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi karena lebih dari 90% penyandang disabilitas Indonesia menggunakan hak pilihnya dan 8,8% yang menyatakan tidak mau berpartisipasi dalam pemilu. Untuk memperjelas partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia Dalam Pemilu 2014

No.	Partisipasi Politik	Persentase
(1)	(2)	(3)
1.	Sangat penting	38,24 %
2.	Penting	41,10 %
3.	Tidak penting	5,88 %
4.	Sangat tidak penting	2,94 %
5.	Tidak tahu	11,78 %
	Jumlah	91,18 %

Sumber: Surat Kabar Online Nasional Sindonews. com yang diakses pada tanggal 05 Desember 2015 pukul 13. 45 WIB.

Lebih lanjut untuk motivasi para penyandang disabilitas yang ingin terlibat dalam pemilu yaitu sebanyak 8,82% dari mereka menjawab tidak tahu, 82,35% dari mereka mengharapkan agar kebijakan yang dibuat untuk mereka lebih baik, 5,88% dikarenakan mendapat imbalan uang, dan 2,94% dikarenakan ikut dengan pilihan orang lain. Pengharapan yang besar dari para penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2014 sangatlah tinggi bagi perubahan nasib mereka. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sangat pesimis atas apa yang dihasilkan oleh pemilu kali ini.

Sejumlah 32,35% mereka merasa bahwa keinginan mereka tidak akan terwakili pada pilihan-pilihan mereka, 17,65% justru beranggapan bahwa kepentingan mereka sangat tidak terwakili, 11,76% merasa sangat terwakili, 26,47% merasa terwakili, 2,94% tidak tahu, dan 8,82% enggan untuk menjawab. Dengan demikian pada prinsipnya harapan tinggi yang diberikan bagi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2014 tetap saja dianggap sebagai pesta demokrasi untuk orang-orang yang tidak memiliki kecacatan fisik seperti mereka dan pemilu 2014 menghasilkan orang-orang yang tidak cukup mewakili atau bahkan sama sekali tidak mewakili kepentingan dan kebutuhan mereka.

Sejalan dengan itu semua berdasarkan hasil pra riset yang peneliti lakukan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas yang dikategorikan

sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial pada wilayah Kota Bandar Lampung mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Banyaknya Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2014

No.	Tahun	Jumlah Penyandang Disabilitas
(1)	(2)	(3)
1.	2010	1. 209
2.	2011	1. 209
3.	2012	741
4.	2013	741
5.	2014	1. 590

Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2014

Berfokus pada data seperti tersebut di atas khususnya pada tahun 2014 diketahui bahwa penyandang disabilitas pada Kota Bandar Lampung berjumlah 1. 590 orang yang tersebar pada 20 kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung dan yang terdaftar pada (Daftar Pemilih Tetap) DPT serta memenuhi syarat sebagai pemilih berjumlah 283 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 194 orang dan 89 orang perempuan. Fenomena ini tentunya menggambarkan bahwa perlu ada perhatian khusus yang ditujukan untuk menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

Kesadaran para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi pada pemilu juga perlu ditingkatkan sebab akan sangat mempengaruhi tingkat golput mereka pada proses pilkada Kota Bandar Lampung. Pada pemilihan gubernur Provinsi Lampung tahun 2014 yang lalu PPUA PENCA memaparkan penelitian terkait persepsi penyandang disabilitas terhadap Pilgub Provinsi Lampung 2014. Hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung dalam Pilgub 2014

No.	Partisipasi Politik	Persentase
(1)	(2)	(3)
1.	Sangat penting	36.15 %
2.	Penting	42.00 %
3.	Tidak penting	4.98%
4.	Tidak tahu	8,05 %
	Jumlah	91,18 %

Sumber: Pusat Pemilihan Umum Akseibilitas Penyandang Cacat (PPUA PENCA) Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data di atas seharusnya 91,18% penyandang disabilitas ikut memilih dalam pemilihan gubernur Provinsi Lampung pada tahun 2014 tetapi nyatanya hanya 35% yang datang ke TPS untuk mencoblos dan menggunakan hak suaranya.

Terkait dengan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian ini, yaitu:

Mario Merly (2015). Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Inti dari penelitian ini adalah aksesibilitas masih jadi permasalahan dalam pemilihan umum 2014. Ketimpangan terhadap aksesibilitas pemilu bagi para penyandang disabilitas tentunya akan menimbulkan sebuah persepsi tersendiri dari mereka terhadap pelaksanaan pemilu. Mahasiswa penyandang disabilitas menilai buruk implementasi perundang-undangan yang telah banyak mengatur aksesibilitas, namun pijakan regulasi tidak mampu dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara pemilu untuk mendesain pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini yang patut diperhatikan adalah sikap politik mahasiswa penyandang disabilitas telah cukup baik. Ketika kebijakan aksesibilitas tetap diabaikan dan tidak menjadi perhatian pemerintah, pada akhirnya peran politik mahasiswa penyandang disabilitas bisa menjadi rentan karena berwujud sikap kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Implikasi terhadap hal ini sangat rentan mempengaruhi ketahanan politik, karena tanpa kepercayaan publik maka kunci penting dalam membangun masyarakat yang demokratis tidak akan terwujud.

(Tesis Ketahanan Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah dimana penelitian sebelumnya lebih melihat tentang sikap politik dari mahasiswa penyandang disabilitas dan lebih membahas tentang aksesibilitas yang di dapat oleh mahasiswa penyandang disabilitas dalam pemilu 2014, dan melihat implikasi atau dampaknya terhadap ketahanan politik. Sedangkan penelitian ini hanya melihat tingkat partisipasi politik dari para penyandang disabilitas dalam pilkada Kota Bandar Lampung dan informan nya adalah para penyandang disabilitas yang terdaftar dalam (Daftar Pemilih Tetap) DPT.

Dengan demikian pentingnya mengetahui dan mengurai secara lebih mendalam tentang partisipasi politik penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas pada pilkada kepala daerah Kota Bandar Lampung baik saat pelaksanaan maupun saat berlangsungnya kegiatan kampanye merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan yang merupakan hak universal (*universal suffrage*) bagi setiap warga negara pada negara demokrasi seperti Indonesia.

Berdasarkan pada pemaparan masalah seperti tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian pada Komisi Pemilihan Umum dan Pusat Pemilihan Umum Penyandang Cacat di Kota Bandar Lampung mengenai “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan khususnya tentang kajian partisipasi politik masyarakat terutama para penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar, Panti Sosial Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung dalam memaksimalkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada pemilu sebagai bagian dari hak dan amanat konstitusi sebagai warga negara Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Poitik

Partisipasi politik warga negara merupakan indikator wujud demokrasi yang ideal dalam negara demokrasi. Di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, setiap warga negaranya berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik, karena setiap keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, seperti yang dikemukakan oleh :

Budiarjo (2008:367), yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai berikut:

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Sedangkan menurut As'ari (2006:151), secara umum partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dalam menentukan pemimpin pemerintahan.

Mengacu pada kedua pendapat ahli di atas maka penulis berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat

didalam negaranya untuk ikut melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas politik maupun pemerintahan yang ada didalam negaranya. Kegiatan warga negara dalam berpartisipasi politik ini pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu, mempengaruhi isi kebijakan umum yang telah dibuat oleh pemerintah bagi masyarakatnya dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik. Selain itu terdapat pendapat lain pula tentang partisipasi politik menurut para ahli yaitu:

Menurut McClosky dalam Budiarmo (2008:367), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Surbakti (2010: 180), mengemukakan pendapatnya mengenai partisipasi politik yaitu sebagai berikut:

Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi menjadi dua yakni, mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Huntington dan Nelson dalam Budiarmo (2008: 368) memberi tafsiran yang lebih luas mengenai partisipasi politik dengan memasukan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Menurut Abramson dan Hardwick menyatakan bahwa partisipasi politik adalah memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan

pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu melanjutkan kepentingan-kepentingan tersebut.

Melihat pendapat beberapa ahli di atas penulis menyimpulkan, terdapat berbagai perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dalam bidang politik, tentunya masing-masing individu memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda-beda dalam memandang kehidupan politik serta turut berperan dalam urusan-urusan politik. Sehubungan dengan ini Maran (2007: 155), memberikan istilah-istilah sebagai berikut :

1) Apatisme Politik

Apatisme politik adalah sikap seseorang yang tidak berminat atau tidak mempunyai perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala umum atau khusus yang ada pada masyarakatnya. Orang yang bersifat apatis adalah orang yang pasif dan mengandalkan perasaan dalam menghadapi permasalahan. Ia tidak mampu melaksanakan tanggungjawabnya baik secara pribadi maupun sebagai warga negara, dan didalam dirinya selalu merasa terancam.

2) Sinisme Politik

Sinisme politik adalah sikap yang dimiliki orang yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Orang-orang yang sinis beranggapan bahwa politik merupakan suatu urusan yang kotor, bahwa politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menjadi korban yang melakukan manipulasi, bahwa kekuasaan dijalankan oleh orang-orang yang tidak tahu malu.

3) Alienasi

Menurut Robert Lane alienasi adalah perasaan keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat. Orang-orang tipe seperti ini cenderung melihat peraturan-peraturan yang ada sebagai tidak adil dan hanya menguntungkan para penguasa.

4) Anomi

Anomi adalah perasaan kehilangan nilai dan arahan hidup, sehingga tidak termotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini. Orang-orang yang memiliki perasaan demikian menganggap

penguasa bersikap tidak peduli terhadap tujuan-tujuan hidupnya. Seperti halnya alienasi, anomie adalah perasaan keterpisahan dari masyarakat. Alienasi dan anomie politik pada gilirannya bisa mencetuskan kekerasan politik.

Melihat istilah-istilah politik yang dikemukakan oleh para ahli di atas penulis beranggapan bahwa tidak semua orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pada kenyataannya hanya sedikit orang yang mau berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan lebih besar jumlah orang yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kehidupan politik. Bahkan terdapat pula orang-orang yang menghindari diri dari semua bentuk-bentuk partisipasi politik, atau hanya berpartisipasi pada tingkat yang paling rendah.

Terdapat pula faktor-faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu salah satunya yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

Faktor internal biasanya datang dari dalam diri individu itu sendiri dan orang-orang terdekat disekitarnya yang bahkan mengetahui tentang kehidupan individu tersebut atau suatu kelompok, sedangkan faktor eksternal biasanya datang dari luar diri individu tersebut. Biasanya faktor eksternal datang dari kelompok-kelompok kepentingan ataupun tim sukses para calon kandidat yang menjadi peserta dalam kegiatan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah.

Selain kedua faktor tersebut terdapat pula faktor-faktor lainnya yang menjadi pendorong timbulnya partisipasi warga negara dalam kehidupan politik, Milbrath dalam Maran (2007: 156), mengemukakan empat faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik yaitu:

- 1) Adanya Perangsang Politik
Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau media diskusi informal.
- 2) Karakteristik Pribadi Seseorang
Orang-orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain biasanya mau ikut serta terlibat dalam urusan politik.
- 3) Karakteristik Sosial Seseorang
Karakteristik sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh karena itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.
- 4) Situasi atau Lingkungan Politik itu sendiri
Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Berdasarkan pendapat tersebut timbulnya gerakan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Selain terdapat faktor-faktor pendorong timbulnya partisipasi warga negara dalam kehidupan politik, terdapat pula alasan warga negara mau menghindari dan menutup diri dari kehidupan politik.

Rosenberg dalam Maran (2007: 156), mengemukakan tiga alasan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu:

- 1) Adanya ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktifitas politik. Disini orang beranggapan bahwa aktivasi politik merupakan ancaman bagi kehidupannya.
- 2) Adanya anggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan sesuatu yang sia-sia. Disini orang merasa partisipasi politiknya hanya sia-sia dan tidak akan mempengaruhi proses politik.
- 3) Tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Maksudnya disini adalah orang tidak menghargai gagasan politik. Tidak ada hasil yang dapat dipetik dari partisipasi tersebut. Sehingga mereka merasa enggan dan tidak mau untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Perlu diketahui bahwa pihak-pihak yang melakukan partisipasi politik tidak hanya perseorangan atau individu saja. Hunting dan Nelson (1994: 21), mengkategorikan usul-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik yang terdiri dari:

- 1) Kelas
Merupakan individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
- 2) Kelompok
Merupakan individu-individu dengan asal usul ras, agama, bahasa atau etnis yang serupa.
- 3) Lingkungan
Merupakan individu-individu yang jarak tempat tinggal (berdomisili) berdekatan.
- 4) Partai
Merupakan individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama, yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atau bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
- 5) Golongan
Merupakan individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain yang akhirnya membentuk hubungan *patron-client*, artinya satu golongan yang mendapatkan pertukaran-pertukaran manfaat secara timbal balik yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi, yang tidak sederajat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis beranggapan bahwa dapat diketahui pihak-pihak yang melakukan partisipasi politik tidak hanya perseorangan atau individu saja. Tetapi mereka dibagi menjadi kelas, kelompok, lingkungan, partai politik, bahkan golongan yang cakupannya lebih luas pun dapat turut serta menjadi pihak yang melakukan kegiatan partisipasi politik.

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik warga negara tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Aktivitas-aktivitas politik tersebut dapat berupa keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik, ikut memberikan suara dalam pemilu, dan ikut menduduki jabatan-jabatan baik politik maupun pemerintahan.

Menurut Surbakti (2010: 182), partisipasi dipandang dari kategori kegiatan dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin daerah. Sebaliknya yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif ialah kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada kegiatan output.

Abramsom dan Hardwick membedakan partisipasi politik dalam dua bentuk, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-

konvensional yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Konvensional	Non-Konvensional
1	2
<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan • Kegiatan Kampanye • Pemberian suara (<i>voting</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan petisi • Berdemonstrasi • Konfrontasi • Mogok • Tindak kekerasan politik terhadap harta-benda(perusakan, pemboman, pembakaran) • Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) • Perang gerilya dan revolusi

Sumber: Pawito (223).

Partisipasi politik konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak berupa tindakan kekerasan. Indikator-indikator bentuk partisipasi politik konvensional yang dapat menjadi alat ukur partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum yaitu:

- a. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik, karena tujuan dari partai politik ialah menduduki jabatan publik. Sedangkan kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang dapat menguntungkan masyarakat terutama masyarakat yang tergabung dalam kelompok kepentingan tersebut.
- b. Kegiatan Kampanye
Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu.

Beberapa teknik kegiatan kampanye yaitu, kampanye dapat dilakukan dari satu rumah ke rumah lainnya oleh tim sukses calon peserta pemilu dengan menanyakan langsung kepada masyarakat persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Selain itu terdapat juga teknik kampanye massa langsung dengan cara menarik perhatian massa seperti pawai, pertunjukan kesenian dan sebagainya. Serta terdapat juga teknik kampanye massa tidak langsung seperti memberikan pidato di radio, televisi dan memasang iklan di berbagai media cetak.

c. Pemberian Suara

Kegiatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di negara demokrasi mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat yang ada di dalam negara tersebut dan telah berumur 17 tahun keatas serta terdaftar dalam DPT. Masyarakat tersebut memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pemilu.

Sedangkan partisipasi non-konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal dan tindakan kekerasan.

Dari kedua bentuk partisipasi politik di atas dalam penelitian ini penulis coba menggunakan partisipasi politik dengan bentuk konvensional yang terdiri dari tiga indikator didalamnya yaitu membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye, dan pemberian suara. Penulis coba menggunakan tiga indikator tersebut karena penulis merasa tiga indikator yang terdapat dalam bentuk partisipasi konvensional dirasa paling tepat digunakan dalam penelitian ini, karena nantinya dapat dianalisis untuk mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015.

2. Intensitas Partisipasi Politik

Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan

pembedaan jenis partisipasi politik menurut frekuensi dan intensitasnya. Rush dan Althof (2005: 142), menyatakan bahwa mereka yang benar-benar berpartisipasi dalam bentuk yang paling banyak dalam aktivitas politik merupakan minoritas (seringkali berupa minoritas yang sangat kecil) dari anggota suatu masyarakat.

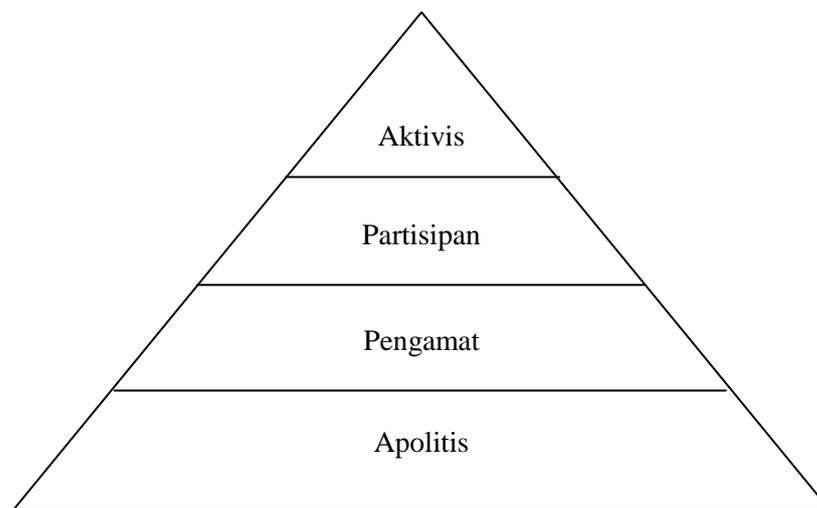
Budiardjo (2008: 371), mengemukakan pendapatnya mengenai intensitas partisipasi politik di negara demokrasi sebagai berikut:

Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.

Ada yang menyamakan dua jenis gejala ini dengan piramida yang basisnya lebar, tetapi menyempit keatas sejalan dengan meningkatnya intensitas politik. Diantara basis dan puncak terdapat kegiatan yang berbeda-beda intensitasnya. Berbeda menurut intensitas kegiatan maupun mengenai bobot komitmen orang yang bersangkutan.

Roth dan Wilson dalam Suryadi (2007: 137), menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitas kegiatannya menjadi aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis. Apabila di jenjangkan, intensitas kegiatan partisipasi politik warganegara tersebut membentuk segitiga yang menyerupai piramida yang kemudian dikenal dengan istilah “piramida partisipasi politik”. Piramida partisipasi politik dapat diterapkan dalam menilai dan menganalisa partisipasi politik warga

negara dalam kegiatan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa.



Gambar 1. Piramida Partisipasi Politik

a. Aktivis

Pada dasarnya tingkat partisipasi politik pada tingkat kategori aktivis seperti para pejabat politik serta pimpinan partai politik atau kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik yang memiliki intensitas tinggi dalam berpartisipasi politik. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan *contacting* dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi sangat efektif.

Terutama bagi pejabat politik, secara politis mereka memiliki peluang yang cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, bahkan secara individual bisa mempengaruhi secara langsung. Pada umumnya orang-orang yang terlibat dalam praktik-praktik partisipasi politik ditingkat kategori aktivis, jumlahnya sangat terbatas, hanya diperuntukan bagi sejumlah kecil orang (terutama elite politik) yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik dengan mekanisme dan kekuatan pengaruh yang diperlihatkan.

Meskipun demikian, kegiatan partisipasi politik ditingkat kategori aktivis, bukan saja ditempuh dengan cara-cara yang formal dan prosedural atau mengikuti peraturan yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan juga terdapat warga negara yang berupaya mempengaruhi proses politik dengan cara-cara yang non-formal, tidak mengikuti jalur yang ditetapkan secara hukum, bahkan sampai pada tindak kekerasan.

b. Partisipan

Partisipan pada tingkat kategori partisipan adalah seperti menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif partai politik, kelompok kepentingan, serta aktif dalam proyek-proyek sosial. Pada tingkat kategori partisipan ditemukan semakin tinggi tingkat partisipasi politik seseorang, maka semakin tinggi intensitasnya dan semakin kecil luas cakupannya. Sebaliknya semakin menuju kebawah, maka semakin kecil intensitasnya dan semakin besar luas cakupannya.

c. Pengamat

Partisipasi politik pada tingkat kategori pengamat seperti menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, dan mengikuti perkembangan politik melalui media massa. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan contoh-contoh kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga negara. Artinya lingkup jumlah orang yang terlibat didalamnya tinggi. Namun tidak demikian dengan intensitas partisipasi politiknya, terutama jika dikaitkan dengan arti pentingnya dalam sistem politik. Praktik-praktik tersebut memiliki tingkat efektifitas yang rendah dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, selain itu membutuhkan waktudan sumberdaya yang cukup banyak.

d. Apolitik

Apolitik adalah kelompok warga negara yang sama sekali tidak terlibat dalam melakukan kegiatan politik. Mereka yang termasuk dalam kategori ini cenderung tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik.

Melihat piramida partisipasi politik di atas penulis sedikit menyimpulkan bahwa semakin tinggi derajat dan aktivitas politik seseorang maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat didalamnya. Pada penelitian ini piramida partisipasi politik diterapkan dalam menilai dan menganalisa partisipasi politik warga negara dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah. Dimana kategori intensitas partisipasi politik warga negara dapat ditentukan berdasarkan aktivitas-aktivitas politik mereka pada tiap tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut.

B. Kesadaran Politik dan Kepercayaan Kepada Pemerintah

Partisipasi politik dinegara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara. Namun, pada kenyataannya persentase warga negara yang berpartisipasi dalam proses kegiatan politik berbeda antar satu negara dengan negara lainnya. Dengan kata lain, tidak semua warga negara di negara demokrasi ikut serta dalam proses kegiatan politik.

Surbakti (2010: 184), menyebutkan faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik).

Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah dia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak?

Berdasarkan pengertian tentang kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis beranggapan bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah (sistem politik) bukanlah faktor-faktor yang berdiri sendiri. Artinya, tinggi rendahnya tingkat kedua faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti status sosial dan status ekonomi seseorang. Seseorang yang memiliki status sosial seseorang dalam masyarakat dan lingkungannya serta status ekonomi yang tinggi dalam lingkungannya

diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang cukup tinggi.

Dikutip dari website <https://aripurwati.wordpress.com> yang di akses pada tanggal 12 November pukul 21. 15 WIB, mengatakan secara umum kesadaran politik yaitu kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan atau pembangunan. Kesadaran politik seseorang dapat terlihat dari:

- 1) Pengetahuan terhadap perkembangan politik. Disini seseorang mengerti dan dengan sadar mengikuti perkembangan politik yang sedang berlangsung.
- 2) Minat terhadap politik. Disini seseorang merasa tertarik untuk turut serta dalam proses politik.
- 3) Perhatian terhadap politik. Disini seseorang memiliki perhatian yang lebih terhadap proses politik.

Pada aspek kepercayaan kepada pemerintah menyangkut penilaian dan apresiasi seseorang terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan maupun terhadap pelaksanaan pemerintahannya. Kepercayaan seseorang terhadap pemerintah dapat dilihat dari:

- 1) Keyakinan pada pemerintah. Disini seseorang percaya bahwa melalui keterlibatannya dalam kegiatan politik, kepentingannya akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan yang berwenang yang diwujudkan dalam sebuah keputusan.
- 2) Kemauan bekerjasama dengan pemerintah. Disini seseorang percaya bahwa kegiatan politik yang ia lakukan mempunyai pengaruh. Sehingga berdasarkan kepercayaan itu ia mau bekerjasama dengan pemerintah untuk memajukan negara dan daerahnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dilihat partisipasi politik seseorang dilakukan berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan adanya kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah, maka seseorang akan merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam suatu proses kegiatan politik maupun pemerintahan dinegaranya.

C. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Vash (1981: 22-23) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan disabilitas:

Disabilitas adalah terdapat kekurangan secara fisiologis, anatomis maupun psikologis yang disebabkan oleh luka, kecelakaan maupun cacat sejak lahir dan cenderung menetap, dengan kata handicap, mengacu pada rintangan yang dialami individu saat dia berupaya melakukan tugas sehari-hari, yang diakibatkan oleh kekurangan tersebut.

Sedangkan menurut Wright (1960:9) Pengertian disabilitas adalah kondisi yang tidak lengkap, baik secara fisik maupun mental, sementara handicap adalah rintangan-rintangan yang dialami individu saat dia mencoba mengerahkan kemampuan maksimalnya namun terhalang oleh kondisi yang ia alami.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa

Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan yang baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang-orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-hak nya sebagai manusia yang hidup seperti manusia lainnya.

2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Disabilitas memiliki beberapa jenis dan bisa terjadi selama masa hidup seseorang atau sejak orang tersebut terlahir ke dunia. Jenis-jenis disabilitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. **Disabilitas Fisik**
Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gangguan pernapasan dan juga epilepsy.
- b. **Disabilitas Mental**
Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.
- c. **Disabilitas Intelektual**
Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.
- d. **Disabilitas Sensorik**
Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.
- e. **Disabilitas Perkembangan**
Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.

Berdasarkan pengertian di atas tentang jenis-jenis disabilitas yang terdiri dari disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, sensorik serta perkembangan maka dalam penelitian ini untuk lebih spesifiknya penyandang disabilitas yang dimaksud disini adalah penyandang

disabilitas dengan jenis kecacatan fisik seperti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahitna, tuna daksa serta tuna ganda.

3. Aksesibilitas Terkait Partisipasi Penyandang Cacat dalam Pemilu

Dilihat dari pengalaman pemilu yang lalu-lalu seperti yang diberitakan dalam surat kabar online sinarharapan. news. com yang di akses pada tanggal 01 November 2015 didalam nya diberitakan bahwa dalam pemilu para penyandang disabilitas masih di anak tirikan. Sehubungan dengan itu juga penyandang disabilitas kurang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan suaranya. Hal-hal yang teridentifikasi sebagai yang memerlukan usaha khusus bagi para penyandang cacat tertentu untuk mengkases kegiatan yang terkait dengan pemilu ialah:

- a. Akses informasi
Akses Informasi yang terkait dengan pemilihan umum, seperti tunanetra sebaiknya memperoleh akses informasi dalam huruf braille, rekaman audio, format elektronik (untuk diakses dengan computer), selanjutnya untuk tunarungu memperoleh layanan penerjemah bahasa isyarat atau media tertulis untuk memahami pidatoyang terkait dengan pemilihan umum.
- b. Akses ketempat pemungutan suara
TPS harus aksesibel bagi pengguna kursi roda (contohnya tidak terletak ditempat yang harus melewati tangga-tangga), bilik suara harus cukup luas untuk dimasuki kursi roda, dan panitia TPS menyiapkan petugas untuk membimbing pemilih tunanetra masuk kebilik suara.
- c. Akses ke surat suara
Sebaiknya tersedia alat bantu pencoblosan untuk memungkinkan pemilih tunanetra melakukan pencoblosan sendiri.

D. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada adalah sarana demokrasi yang diciptakan untuk mengatur pergiliran kekuasaan dan perebutan kepentingan politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan pengertian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk berada ditatanan wilayah provinsi, bupati, dan wakil bupati untuk ditatanan wilayah kabupaten serta walikota dan wakil walikota untuk tatanan diwilayah kota.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana masyarakat daerah secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Pemerintahan yang dibentuk melalui pilkada itu berasal dari rakyat dan diabdikan untuk rakyat.

1. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah

Rumusan mengenai asas-asas pilkada telah tertuang dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Prihatmoko (2005: 110-111), pengertian asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:

- a. **Langsung**
Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.
- b. **Umum**
Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- c. **Bebas**
Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. **Rahasia**
Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- e. **Jujur**
Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. **Adil**
Dalam penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun.

2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan tujuan agar masyarakat dapat memilih kepala daerah secara demokratis yang dapat memimpin mereka dan memenuhi hak-hak mereka dengan kebijakan yang dibuat. Selain itu tujuan diselenggarakannya pilkada adalah untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Pemerintahan lokal

yang demokratis dapat terbentuk jika pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal, selain itu pemerintahan yang demokratis dapat terbentuk apabila mengedepankan pelayanan untuk kepentingan publik dan meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan argumentasi yang dipaparkan di atas menurut Bambang Widjojanto setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan utama masyarakat mendesak agar dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu:

1. Masyarakat ingin agar kepala daerah yang nantinya mereka pilih lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut menentukan hasil pemilihan itu
2. Rakyat ingin agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan menentukan sendiri, apakah kepala daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.
3. Pemilihan langsung kepala daerah akan membuat basis tanggung jawab kepala daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya bukan hanya kepada *interest* politik dari kekuatan politik saja.

E. Kerangka Pikir

Partisipasi politik dipandang sebagai perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Sehubungan dengan diadakannya pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015 mengetahui dan mengurai secara lebih mendalam tentang partisipasi politik

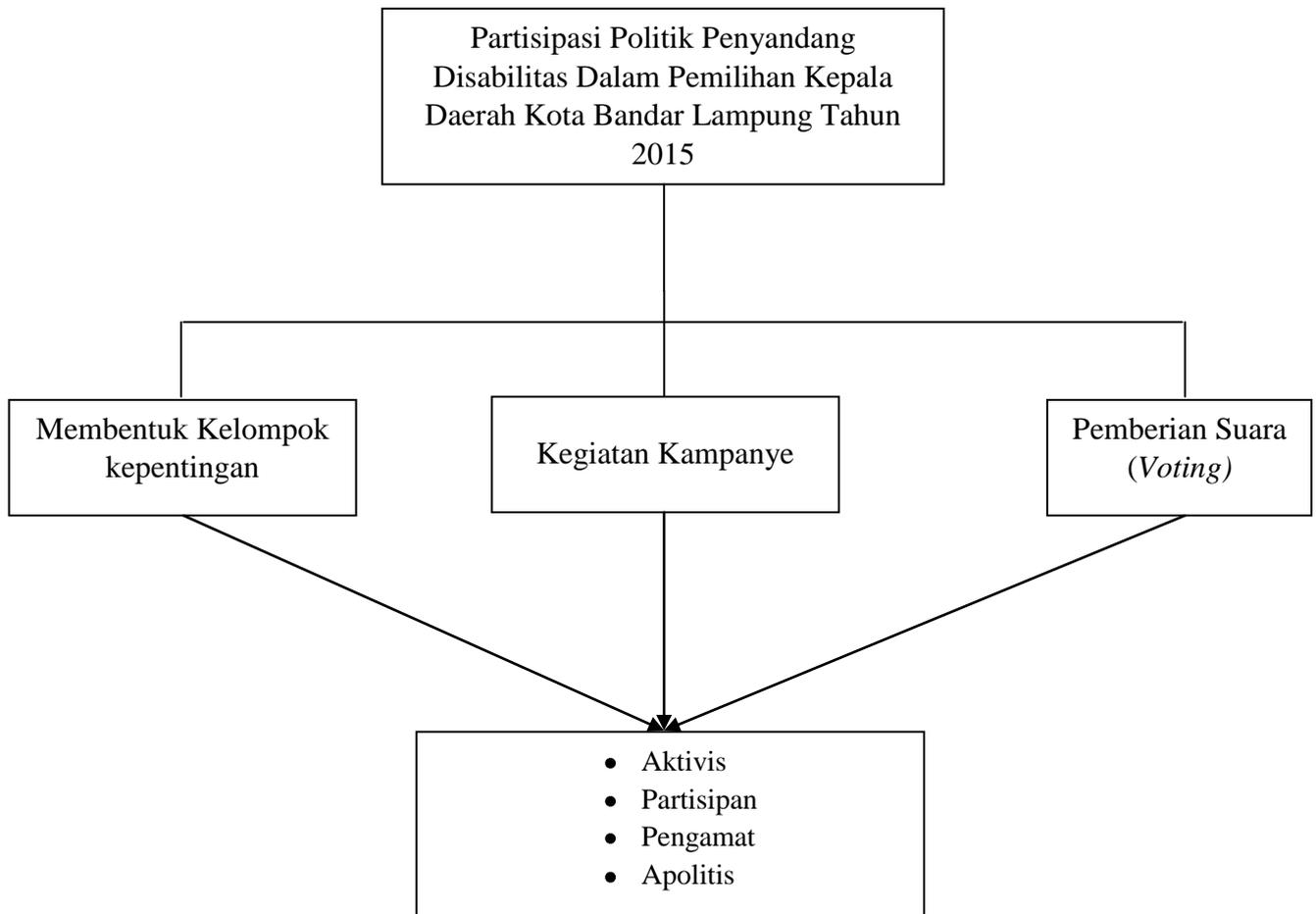
penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas pada pemilu merupakan salah satu perwujudan dari prinsip keterbukaan yang merupakan hak pilih universal (*universal suffrage*) bagi setiap warga negara di negara demokrasi seperti Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas fisik. Jenis penyandang disabilitas fisik adalah orang-orang yang mempunyai gangguan atau kelainan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan mereka, contohnya seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita serta tunaganda. Penilaian tersebut mengacu pada bentuk partisipasi politik konvensional menurut Abramson dan Hardwick.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur partisipasi politik dalam pemilu misalnya adalah membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan tertentu, ikut ambil bagian dalam kegiatan kampanye, serta memberikan suara dalam pilkada Kota Bandar Lampung. Setelah dikaji berdasarkan indikator seperti tersebut di atas pada akhirnya akan menghasilkan kategori intensitas partisipasi politik yang dapat digolongkan ke dalam kategori aktivis, partisipan, pengamat, atau apolitis.

Berdasarkan pemaparan seperti tersebut di atas maka partisipasi politik seluruh masyarakat termasuk juga penyandang disabilitas menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terciptanya pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu indikator yang tepat tentu akan sangat menunjang penilaian terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kota

Bandar Lampung 2015. Agar lebih memudahkan pembaca penelitian ini bagan kerangka pikir akan digambarkan dengan bentuk sebagai berikut:



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Penyampaian data dan informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

Alasan penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian tentang partisipasi politik penyandang disabilitas pada pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015 adalah dikarenakan fakta, hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah di analisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang partisipasi politik penyandang disabilitas pada moment pilkada Kota Bandar Lampung.

Nawawi (2001: 63), mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai berikut:

Penelitian deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan

subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisa hanya pada sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.

Tujuan penelitian deskriptif menurut Nazir (2003: 54), adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam tentang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu.

Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini diperlukan untuk menggambarkan fenomena mengenai keseluruhan proses dari permasalahan yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dan berusaha untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam proses tersebut. Tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian, maka alasan peneliti dalam menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimanakah bentuk dan intensitas partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015.

B. Fokus Penelitian

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian maka perlu adanya beberapa batasan masalah dan fokus penelitian. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.

Fokus penelitian ini adalah mengetahui partisipasi politik dari para penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik yang meliputi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita serta tunaganda pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015 dengan menggunakan beberapa indikator. Indikator-Indikator tersebut meliputi:

1. Membentuk Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan organisasi yang memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang dapat menguntungkan masyarakat terutama masyarakat yang tergabung dalam kelompok kepentingan tersebut. Fokus penelitian dalam hal ini yang ingin diamati ialah bergabungnya para penyandang disabilitas dengan tim sukses pasangan calon kepala daerah Kota Bandar Lampung atau para penyandang disabilitas hanya menjadi simpatisan.

2. Kegiatan Kampanye

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Semua masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan kampanye termasuk para penyandang disabilitas, namun dalam hal ini yang ingin dilihat ialah seberapa aktif para penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan kampanye pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015.

3. Pemberian Suara

Pemberian suara merupakan proses pemberian suara dalam pemilu yang merupakan hak bagi setiap warga negara termasuk juga penyandang disabilitas, dalam hal ini penulis akan mengamati jumlah atau angka penyandang disabilitas yang ikut memilih pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015.

Berdasarkan indikator-indikator yang diteliti di atas maka pada tahap kesimpulan partisipasi politik penyandang disabilitas dapat dikategorikan sebagai intensitas partisipasi politik:

1. Aktifis yaitu mengikuti seluruh kegiatan politik terutama pada saat momentum pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015.
2. Partisipan yaitu rutin dalam mengikuti kegiatan kampanye, menjadi anggota aktif partai politik, serta aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan proyek sosial

3. Pengamat yaitu para penyandang disabilitas yang pada momentum pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015 mengikuti atau bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan seperti menjadi tim sukses para calon kepala daerah, menghadiri rapat-rapat umum terkait pilkada dan memberikan haknya pada saat pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015.
4. Apolitis yaitu para penyandang disabilitas yang sama sekali tidak ingin mengetahui dan melakukan kegiatan politik baik dalam momentum pilkada ataupun tidak.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu dalam penelitian ini dilakukan pada:

Tabel 5. Lokasi dan Waktu Penelitian

No.	Lokasi Penelitian	Waktu Penelitian
(1)	(2)	(3)
1.	KPU Kota Bandar Lampung	25 Februari 2016
2.	PPUA Penca Kota Bandar Lampung	14 April 2016
3.	Panwaslu Kota Bandar Lampung	15 April 2016

Sumber : Hasil Penelitian 2016

Pada tanggal 25 Februari 2016 peneliti melakukan penelitian di KPU Kota Bandar Lampung, selanjutnya pada tanggal 14 April 2016 Peneliti melakukan penelitian pada yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung sebagai kunci informan dari penelitian ini, dan berlanjut pada tanggal 15 April 2016 peneliti melakukan penelitian di Panwaslu Kota Bandar Lampung.

D. Jenis Data

Menurut Masri Singarimbun dan Soffian Efendi (1989: 14) menjelaskan bahwa dalam penelitian ilmiah data didapatkan dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data yang telah diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) langsung. Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait isu/ pokok masalah dalam penelitian kepada informan. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan informan. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data terkait tentang partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015 yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, catatan-catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai buku-buku/ literatur penunjang, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang dimiliki oleh yayasan PPUAPENCA (Pusat Pemilihan Umum Aksesibilitas

Penyandang Cacat) Kota Bandar Lampung seperti halnya banyaknya jumlah penyandang disabilitas yang tinggal di dalam yayasan tersebut dan data tentang keikutsertaan para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Selain itu data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung seperti jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data.

Proses wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu peneliti memberikan batasan pertanyaan terhadap informan dengan sudah mempersiapkan pertanyaan secara tertulis, sehingga proses wawancara

dan apa yang akan ditanyakan tidak menyimpang dari fokus dan tujuan dari penelitian.

Berikut merupakan data wawancara terhadap informan:

- a. Dedy Triadi, S.E selaku anggota dari KPU Kota Bandar Lampung yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 25 Februari 2016 di KPU Kota Bandar Lampung dengan hasil wawancara terlampir .
- b. Supron Ridisno, S.Ag selaku ketua dari Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung yang diwawancarai oleh peneliti dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 di Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung dengan hasil wawancara terlampir.
- c. Ade salah satu mahasiswa penyandang disabilitas yang ada di Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 14 April 2016 di Yayasan PPUA Penca dengan hasil wawancara terlampir.
- d. Pebri Prayudi seorang penyandang disabilitas yang juga terdapat di Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung yang diwawancarai peneliti pada tanggal 14 April 2016 di Yayasan PPUA Penca dengan hasil wawancara terlampir.
- e. Sabar Firmanto penyandang disabilitas pada Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal yang sama yaitu 14 April 2016 bertempat di Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung dengan hasil wawancara terlampir.

- f. Muhammad Alan penyandang disabilitas pada Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal yang sama yaitu 14 April 2016 bertempat di Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung dengan hasil wawancara terlampir.
- g. Rino Pratama juga seorang penyandang disabilitas pada Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 14 April 2016 bertempat di Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung dengan hasil wawancara terlampir.
- h. Feri Wahyudi seorang penyandang disabilitas pada Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal yang sama yaitu 14 April 2016 bertempat di Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung dengan hasil wawancara terlampir.
- i. Reddyah Renata Suharno, S.IP. Selaku staff dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang diwawancarai oleh peneliti sebagai informan yang dapat mengabsahkan data yang diperoleh oleh peneliti. Diwawancarai pada tanggal 15 April 2016 bertempat di Kantor Panwaslu Kota Bandar Lampung dengan hasil wawancara terlampir.
- j. Bapak Harlan salah satu tim sukses pemenangan calon kepala daerah Kota Bandar Lampung yang diwawancarai pada tanggal 5 Juni 2016 bertempat dikediamannya daerah Pramuka dengan hasil wawancara terlampir.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber data resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga/ perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.

Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Data yang dikeluarkan oleh KPU Kota Bandar Lampung yaitu jumlah para penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT dan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya saat Pilkada Kota Bandar Lampung berlangsung. Selain itu sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Lampung tentang jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang tersebar di 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2015.

F. Teknik Pengelolaan Data

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap *Editing*, pada tahap ini merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten, dan lengkap. Dalam tahap ini data yang dianggap tidak dibutuhkan atau pun tidak relevan akan disingkirkan.

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data yang telah ada untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap suatu data. Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melalui tahap editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi data dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi.

G. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan/informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik *snowball sampling* yaitu memilih unit-unit yang mempunyai karakteristik langka dan unit-unit tambahan yang ditunjukkan oleh

informan sebelumnya. Dari informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan dengan partisipasi para penyandang disabilitas dalam adanya setiap Pemilu. Data mengenai informan-informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6: Deskripsi Informan

No.	Nama	L/P	Usia	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dedy Triyadi	L	41 Th	Anggota KPU Kota Bandar Lampung
2.	Supron Ridisno	L	45 Th	Ketua PPUA Penca Kota Bandar Lampung
3.	Ade	L	25 Th	Penyandang Disabilitas
4.	Pebri Prayudi	L	30 Th	Penyandang Disabilitas
5.	Sabar Firmanto	L	30 Th	Penyandang Disabilitas
6.	Muhammad Alan	L	34 Th	Penyandang Disabilitas
7.	Rino Pratama	L	23 Th	Penyandang Disabilitas
8.	Feri Wahyudi	L	41 Th	Penyandang Disabilitas
9.	Reddyah Ranata Suharno S.IP	P	24 Th	Staff Panwaslu Kota Bandar Lampung
10.	Harlan	L	41 Th	Tim Sukses Calon Kepala Daerah Kota Bandar Lampung

Sumber: Wawancara Informan Februari-Juni 2016

Pada prosesnya pertama-tama peneliti datang kepada seseorang yang menurut peneliti pengetahuannya dapat dijadikan sebagai *key informan*. *Key informan* dalam penelitian ini adalah KPU Kota Bandar Lampung, karena mempunyai posisi dan peran yang penting dalam mengetahui bagaimana partisipasi politik dari para penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kota Bandar Lampung sehingga data-data yang diperoleh dapat relevan. Setelah berkomunikasi secara cukup oleh *key informan* (informan 1) menunjukkan subjek lain yang dipandang mengetahui lebih banyak masalah yang terkait dengan penelitian ini yaitu ketua dari yayasan

PPUA Penca Kota Bandar Lampung sehingga peneliti menunjuknya sebagai informan baru (Informan 2). Demikian selanjutnya sehingga data dan keterangan yang diperoleh semakin banyak, lengkap, dan mendalam.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan ataupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maka teknik analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya, meliputi:

1. *Reduksi data*, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk

analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data peneliti dilakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini peneliti memilih kata-kata yang dapat digunakan untuk melakukan pembahasan.

Peneliti mengumpulkan data mengenai faktor-faktor penyebab partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Peneliti mewawancarai informan yaitu anggota dari KPU Kota Bandar Lampung, Ketua Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung, Para Penyandang Disabilitas dan Staff Panwaslu Kota Bandar Lampung dengan menggunakan pertanyaan yang sama untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti.

2. *Display data*, yaitu peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari lokasi hasil penelitian. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci serta menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi-deskriptif.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah direduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan

lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Penarikan kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus dapat diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang peneliti lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan dan fokus penelitian ini.

Setelah melakukan reduksi data dan display data peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. Peneliti menarik kesimpulan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Bandar Lampung cukup banyak mencapai sekitar 87% hal tersebut dinilai dari tiga indikator berdasarkan teori Abramsom dan Harwick yaitu bergabung dalam kelompok kepentingan, mengikuti kegiatan kampanye dan memberikan suaranya di TPS. Dari penilaian 3 indikator di atas maka kesimpulan yang ditarik oleh peneliti apabila digolongkan dalam intensitas partisipasi politik adalah sebagai pengamat, karena kebanyakan dari mereka hanya berpartisipasi dalam memberikan suaranya pada saat pilkada dilaksanakan.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan dari data tersebut.

Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mewawancarai informan yang juga mengetahui permasalahan pada penelitian ini. Informasi dari informan tersebut akan dikompilasikan dengan hasil wawancara yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang sama dan memiliki validitas yang tinggi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Pada tahun 1912 wilayah Kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda termasuk wilayah Onder Afdeling Telokbetong yang dibentuk berdasarkan Staatsbalat 1912 Nomor: 462, yang terdiri dari Ibukota Telokbetong sendiri dan daerah-daerah disekitarnya. Sebelum tahun 1912, Ibukota Telokbetong ini meliputi juga Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara Kota Telokbetong (Encyclopedie Van Nedderland Indie, D.C.STIBBE bagian IV). Ibukota Onder Afdeling Telokbetong adalah Tanjungkarang, sementara Kota Telokbetong sendiri berkedudukan sebagai Ibukota Keresidenan Lampung. Kedua kota tersebut tidak termasuk ke dalam Marga Verband, melainkan berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang tunduk kepada Hoof Van Plaatsleyk Bestuur selaku Kepala Onder Afdeling Telokbetong.

Kemudian sejak zaman Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tanjungkarang dan Kota Telokbetong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan

dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjungkarang-Telukbetung.

Pada perkembangannya, status Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung (berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1965), Kota Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254).

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini.

Sejak berdirinya Kota Bandar Lampung sampai saat ini Walikota yang pernah memimpin Kota Bandar Lampung secara berturut-turut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Daftar Walikota Bandar Lampung dari Masa ke Masa

No.	Nama	Periode
(1)	(2)	(3)
1.	Sumarsono	1956-1957
2.	H. Zainal Abidin Pagar Alam	1957-1963
3.	Alimuddin Umar, S.H	1963-1969
4.	Drs. H.M. Thabrani Daud	1969-1976
5.	Drs. M. Fauzi Saleh	1976-1981
6.	Drs. Zulkarnain Subing	1981-1986
7.	Drs. Nurdin Muhayat	1986-1995
8.	Drs. Suharto	1995-2005
9.	Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd.	2005-2010
10.	Drs. H. Herman H.N	2010-2015
11.	Drs. H. Herman H.N	2016-2021

Sumber: lampungzone.blogspot.com/2012/sejarah-kota-bandar-lampung

Seperti apa yang sudah dijelaskan pada tabel di atas bahwa pada tahun 1956-1957 Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Sumarsono, selanjutnya pada tahun berikutnya tahun 1957-1963 H. Zainal Abidin Pagar Alam menggantikan posisi Sumarsono sebagai Walikota Bandar Lampung. Di periode selanjutnya Alimuddin Umar, S.H menggantikan posisi Zainal Abidin Pagar Alam sebagai walikota Bandar Lampung, setelah itu walikota keempat Kota Bandar Lampung adalah Drs. H.M Thabrani Daud, yang kemudian digantikan lagi oleh Drs. M. Fauzi Saleh, Drs. Zulkarnain Subing, Drs. Nurdin Muhayat, dan pada tahun 1995-2005 walikota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. Suharto yang menjabat selama dua periode.

Setelah menjabat selama dua periode kemudian kedudukannya sebagai walikota Bandar Lampung digantikan oleh Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd. Setelah tidak menjabat lagi sebagai walikota Bandar Lampung, kemudian posisi beliau di gantikan oleh Drs. Herman H.N dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. (Sumber: lampungzone.blogspot.com/2012/sejarah-kota-bandar-lampung)

B. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ} 20'$ sampai dengan $5^{\circ} 30'$ lintang selatan dan $105^{\circ} 28'$ sampai dengan $105^{\circ} 37'$ bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat. Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah $197,22 \text{ km}^2$ yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan didalamnya. 20 Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung antara lain:

1. Kecamatan Teluk Betung Utara
2. Kecamatan Teluk Betung Barat

3. Kecamatan Teluk Betung Selatan
4. Kecamatan Teluk betung Timur
5. Kecamatan Tanjung Karang Barat
6. Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7. Kecamatan Tanjung Karang Timur
8. Kecamatan Tanjung Senang
9. Kecamatan Bumi Waras
10. Kecamatan Enggal
11. Kecamatan Kedamaian
12. Kecamatan Kedaton
13. Kecamatan Kemiling
14. Kecamatan Labuhan Ratu
15. Kecamatan Langka Pura
16. Kecamatan Panjang
17. Kecamatan Rajabasa
18. Kecamatan Sukabumi
19. Kecamatan Sukarame
20. Kecamatan Wayhalim

Dengan populasi penduduk 1.167.101 jiwa (berdasarkan data tahun 2014), kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km² dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030.

C. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Jadi Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Komisi Pemilihan Umum terdapat diseluruh wilayah Indonesia baik ditingkat Kabupaten/Kota, termasuk di Kota Bandar Lampung. Tugas Pokok dari KPU Kota Bandar Lampung yaitu adalah:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu.
2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu.
3. Mengelola, menyusun data pemilih.
4. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu.
5. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu.
6. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi dan administrasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu.
7. Mengelola dan menyusun rencana bagian keuangan, umum, dan logistik.

1. Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung

a. Visi

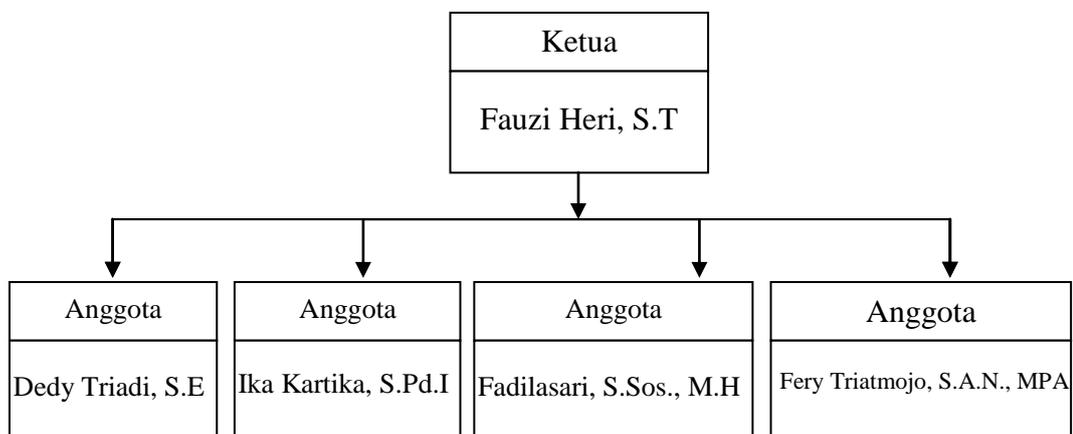
Terwujudnya KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan bermanfaat.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu.
- 2) Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 3) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil untuk menegakan peraturan Pemilu secara konsisten secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Berikut merupakan bagan struktur keorganisasian komisioner KPU Kota Bandar Lampung:

**STRUKTUR ORGANISASI KOMISIONER
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE 2014 S/D 2019**



Gambar 4: Struktur Organisasi Komisioner KPU Kota Bandar Lampung
Periode 2014-2019

Sumber: <http://kpu-bandarlampungkota.go.id/>

D. Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Pilkada Kota Bandar Lampung adalah Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung untuk periode 2015-2020. Pemilihan ini diikuti oleh 3 pasang calon yaitu:

1. Muhamad Yunus – Ahmad Muslimin
2. Herman HN – Yusuf Kohar
3. Tobroni Harun – Komarunizar

Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 bersamaan dengan pemilihan kepala daerah serentak di 9 Provinsi di Indonesia dan 269 kabupaten/kota didalamnya.

Hasil perolehan suara pada pilkada Kota Bandar Lampung berdasarkan Real Count KPU hasil hitung TPS (From C1) Data yang masuk 100% dari 1.300 TPS di Kota Bandar Lampung adalah:

1. Muhammad Yunus, SH. dan Ahmad Muslimin memperoleh suara sebanyak 8.326 suara (2,01%)
2. Drs. Herman HN, MM. dan Muhammad Yusuf Kohar, SE., MM. memperoleh suara sebanyak 358.254 suara (86,66%)
3. H. Tobroni Harun, ST.,MM. dan Komarunizar, S.Ag. memperoleh suara sebanyak 46.804 suara (11,32%)

(Sumber: <https://quick-count-pilkada-kota-bandar-lampung.com>)

Pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 juga didalamnya termasuk partisipasi dari para penyandang disabilitas yang ikut memberikan hak suaranya dalam pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung yang tersebar di 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung terdiri dari kurang lebih 141 penyandang cacat yang terdaftar dalam DPT dengan jenis kecacatan berbeda-beda seperti tuna netra, tuna rungu, tuna daksa dll. Mereka menggunakan hak pilihnya di TPS tempat tinggal mereka masing-masing, berikut data yang penulis dapatkan tentang jumlah penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung beserta penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Jumlah Penyandang Disabilitas & Pengguna Hak Pilih Disabilitas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih Disabilitas	Pengguna Hak Pilih	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bumi Waras	0	0	
2.	Enggal	0	0	
3.	Kedamaian	2	2	100%
4.	Kedaton	5	4	80%
5.	Kemiling	52	47	90%
6.	Labuhan Ratu	0	0	
7.	Langkapura	5	5	100%
8.	Panjang	16	16	100%
9.	Rajabasa	22	12	55%
10.	Sukabumi	9	8	89%
11.	Sukarame	0	0	
12.	Tanjung Senang	0	0	
13.	Tanjungkarang Barat	0	0	
14.	Tanjungkarang Pusat	3	2	67%
15.	Tanjungkarang Timur	15	15	100%
16.	Telukbetung Barat	10	10	100%
17.	Telukbetung Selatan	0	0	
18.	Teluk Betung Timur	0	0	
19.	Teluk Betung Utara	1	1	100%
20.	Wayhalim	1	1	100%
	Total	141	123	87%

Sumber data: KPU Kota Bandar Lampung

Dari data yang terlihat pada tabel di atas terlihat bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dapat dikatakan cukup besar, mencapai 87% dari persentase 100%.

E. Yayasan Pusat Pemilihan Umum Aksesibilitas Penyandang Cacat (PPUA Penca)

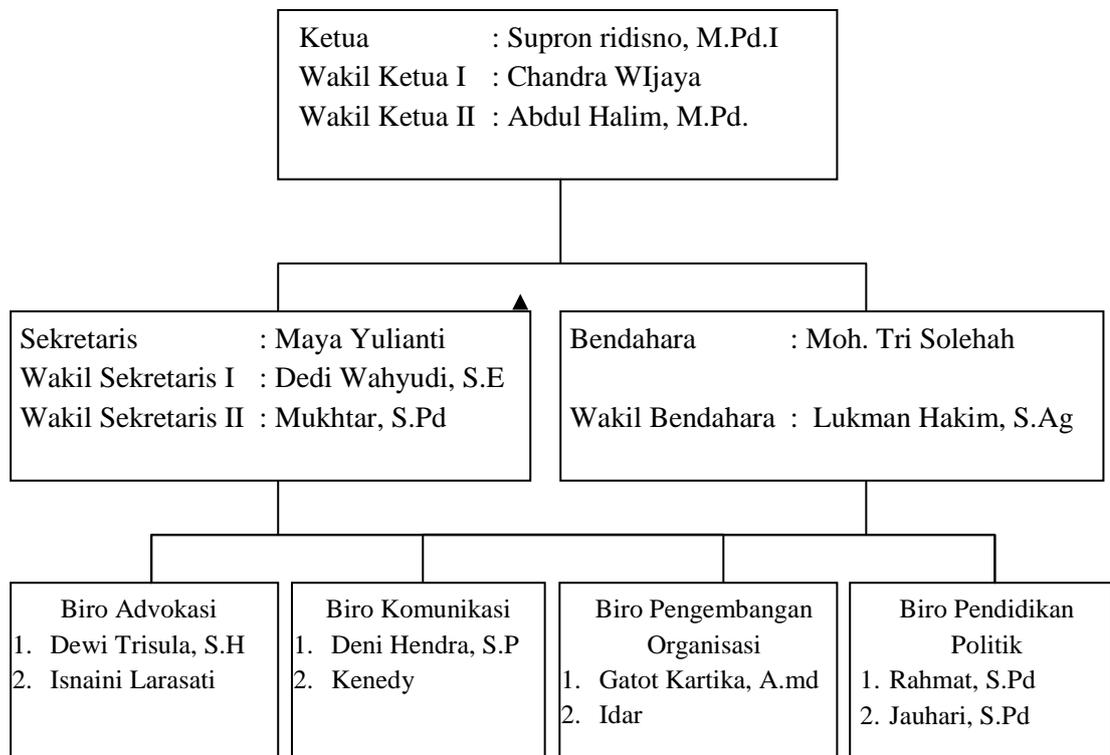
Pusat Pemilihan Umum Aksesibilitas Penyandang Cacat (PPUA Penca) didirikan tahun 2004 atas prakarsa yang muncul dari kurangnya perhatian, perlindungan dan kesetaraan bagi pemilih disabilitas. Tugas dari PPUA Penca adalah untuk mengadvokasi hak-hak politik penyandang disabilitas dalam

pemilu, terutama dalam menyediakan fasilitas yang dapat diakses pemilih yang memiliki kekurangan fisik. Pendidikan pemilih dan latihan melalui simulasi termasuk sesi khusus untuk para tunarungu menjadi target utama dari PPUA Penca.

PPUA Penca mengadakan pendidikan pemilih dan latihan simulasi untuk penyandang disabilitas. PPUA Penca lebih lanjut dipercaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merancang template Braille dan alat-alat bantu lain untuk pemilih tunanetra. Selain itu PPUA Penca juga telah secara proaktif memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberi perhatian pada hak-hak politik penyandang disabilitas.

Yayasan PPUA Penca kota Bandar Lampung terletak di JL.Pramuka kecamatan Rajabasa, yayasan ini sudah berdiri di Kota Bandar Lampung sejak tahun 2004. Tugas dan fungsi PPUA Penca untuk para penyandang disabilitas adalah untuk mengadvokasi implementasi hak-hak politik warga negara penyandang disabilitas yaitu hak untuk dipilih dan memilih dalam setiap pelaksanaan pemilu, selain itu implementasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilu dengan segala tahapannya serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang memberikan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas. Berikut struktur dewan pengurus PPUA Penca Lampung masa bhakti 2014-2019:

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
YAYASAN PPUA PENCA PERIODE 2014 S/D 2019**



Sumber: Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung

Gambar 5. Struktur Kepengurusan Yayasan PPUA Penca Kota Bandar Lampung Periode 2014-2019

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya terhadap temuan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015 tergolong kedalam kelompok pengamat, hal ini dibuktikan dengan:

1. Minim intensitas dari partisipasi politik penyandang disabilitas dalam bergabung ke tim sukses para calon kepala daerah Kota Bandar Lampung, walaupun beberapa dari mereka masih ada yang ingin masuk dan bergabung dalam kegiatan tersebut tetapi sebagian besar dari mereka enggan untuk melakukan hal tersebut.
2. Minimnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh para calon kepala daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015.
3. Penyandang disabilitas lebih cenderung memilih memberikan suaranya dan menggunakan hak pilihnya pada saat pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015. Dari 20 kecamatan yang tersebar di Kota Bandar Lampung keseluruhan jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT

sebanyak 141 dan hanya 123 dari mereka yang ikut berpartisipasi dalam pilkada Tahun 2015 di Kota Bandar Lampung dengan keseluruhan persentase sebanyak 87%.

B. Saran

Berdasarkan simpulan-simpulan yang diperoleh, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Penyandang disabilitas harus lebih meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan politik dan pemerintahan yang diselenggarakan pada tingkat lokal maupun tingkat nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik dalam bergabung kekelompok kepentingan ataupun mengikuti kegiatan kampanye.
2. Pemerintah dan KPU selaku penyelenggara dari pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung harus lebih memperhatikan hak-hak para penyandang disabilitas agar para penyandang disabilitas mau mengikuti kegiatan politik yang diselenggarakan selain itu agar para penyandang disabilitas tidak merasa dianak tirikan karena keterbatasan fisik yang mereka miliki.
3. Membuat TPS khusus untuk para penyandang disabilitas agar mempermudah mereka dalam memberikan hak suaranya serta mempermudah akses mereka untuk pergi ke TPS.

C. Kelemahan Penelitian

Kelemahan yang ada dipenelitian ini adalah, peneliti merasa data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi sangat minm untuk dapat dapat dianalisis dan dikaji lebih lajut, selain itu juga peneliti merasa kurang dapat menggali informasi lebih mendalam kepada informan terkait masalah penelitian sehingga peneliti kurang dapat mempertajam analisis dari hasil wawancara yang sudah didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Althoff, Michael Rush dan Phillip. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andrew, Mochtar Mas'oeed dan Collin Mac. 2003. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- As'ari, Deni Kurniawan. 2006. *Kamus Istilah Politik & Kewarganegaraan*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosisologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parwito. 2009. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahman, Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: SIC.
- Sugiarto, Eko. 2008. *Panduan Menulis*. Jakarta: Media Pressindo.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Sy, Pahmi. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Pers.

Toha, Anggoro M. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Universitas Lampung. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Zainuddin, Masyhuri dan M. 2008. *Metodelogi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Literatur Lainnya:

Undang-Undang:

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Internet:

Akses Penyandang Disabilitas Pada Pilkada dikampanyekan/politik/tempo.com
<http://m.tempo.co/read/news/2015/11/24/078721810/akses-penyandang-disabilitas-pada-pilkada-dikampanyekan>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2016.

http://www.bbc.com/indonesia/beritaindonesia/2015/01/150129/Indonesiadifabel_pemilu. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2015.

<http://www.sinarharapan.com/news/read/140404028/Pyenyandang-Disabilitas-Masih-Dianaktirikan>. Diakses pada tanggal 01 November 2015.

<http://lampost.com/berita/pemilukada-ramah-penyandang-disabilitas>. Diakses pada tanggal 01 November 2015.

website <http://kementerian-kesejahteraan-sosial-Republik-Indonesia> yang diakses pada tanggal 02-November-2015.

<http://nasional.sindonews.com/read/874222/18/partisipasi-penyandang-disabilitas-dalam-politik-2014-1402980880>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2015.

<https://aripurwati.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 12 November 2015.

Penelitian Terdahulu

Mario Merly (2015). Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Ketahanan Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.